

**PRAKTIK MENAIKKAN HARGA SEPIHAK OLEH PEDAGANG ES
KRIM *AICE* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

**(Studi Pada Pedagang Es Krim *Aice* di Desa Triharjo Kecamatan Merbau
Mataram Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

**Nur Fauzi
NPM : 1621030491**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442H/2020M

**PRAKTIK MENAIKKAN HARGA SEPIHAK OLEH PEDAGANG ES
KRIM AICE DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

**(Studi Pada Pedagang Es Krim Aice di Desa Triharjo Kecamatan Merbau
Mataram Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

Nur Fauzi

NPM. 1621030491

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442H/2020M**

ABSTRAK

Muamalah adalah salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Aktivitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Adapun prinsip jual beli yaitu perjanjian tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syariat Islam. Maka dari itu apabila terdapat salah satu rukun maupun syarat dalam jual beli yang tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana praktik menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim *aice*? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim *aice*? Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui praktik menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim *aice*. 2) Mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim *aice*. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Sedangkan dalam pengumpulan data skripsi ini menggunakan 1) observasi 2) dokumentasi 3) wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh suatu kesimpulan, praktik menaikkan harga yang dilakukan oleh *reseller* es krim *aice* yaitu dengan memanipulasi harga yang sebelumnya sudah disepakati antara pihak agen dengan pihak *reseller*. Pihak *reseller* es krim *aice* menaikkan harga es krim *aice* berdasarkan beberapa penyebab yakni ketidaktahuan konsumen es krim *aice* dan harga yang telah dimanipulasi tersebut dan untuk biaya pembayaran listik untuk *freezer* es krim *aice*. Pandangan hukum Islam terhadap praktik menaikkan harga sepihak oleh pedagang es krim *aice* tentu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak pedagang atau *reseller* jelas merugikan pihak konsumen, yang mana menimbulkan rasa tidak rela atau tidak rida dari dalam diri konsumen, yang mengakibatkan jual beli yang terjadi menjadi *fasad* (rusak) dan tidak boleh untuk dilakukan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pedagang atau *reseller* melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 62 ayat 1, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf a, huruf b, huruf c, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Fauzi

Npm : 1621030491

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Menaikkan Harga Sepihak Oleh Pedagang Es Krim Aice Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pedagang Es Krim Aice di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi,

Bandar Lampung,

Penulis,

Nur Fauzi
NPM. 1621030491



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Praktik Menaikkan Harga Sepihak Oleh Pedagang Es Krim Aice Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pedagang Es Krim Aice di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : Nur Fauzi

NPM : 1621030491

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Juhratul Khulwah, M.S.I.
NIP. 199107092018012002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Praktik Menaikkan Harga Sepihak Oleh Pedagang Es Krim Aice Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pedagang Es Krim Aice di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)"** disusun oleh **Nur Fauzi Npm 1621030491** Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 04 November 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : Kartika S, S.Pd., M.Pd

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Penguji I : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I

Penguji II : Juhratul Khulwah, M.S.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Drs. H. Khoiruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa [4] : 29)¹



¹Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Semarang: CV Asy-Syifa, 1989), h. 122.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Suhartini dan Bapak Solimi yang aku cintai dan aku banggakan. Selalu menguatkan, merawat, dan memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendoakanku agar selalu berada dalam jalan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nenekku Siti Fatimah dan Kakekku Pariyo yang aku cintai dan aku banggakan yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakakku Riska Permatasari, dan Atiq Khumairah yang senantiasa selalu mendoakanku, serta Keluarga Besarku yang telah memberi dorongan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

RIWAYAT HIDUP

Nur Fauzi lahir di Banyumas pada tanggal 21 Oktober 1998. Anak ke tiga yang terlahir dari pasangan Bapak Solimi dan Ibu Suhartini. Riwayat pendidikannya di mulai di Sekolah Dasar di SDN 1 Triharjo 2004 dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Tanjung Bintang selesai pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan Sekolah SMAN 1 Tanjung Bintang selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Menaikkan Harga Sepihak Oleh Pedagang Es Krim *Aice* Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pedagang Es Krim *Aice* di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan).**

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawamu dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;

2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Mu'amalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris jurusan Mu'amalah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah M.S.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
6. Semua narasumber, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;
7. Sahabat serta orang terkasih saya Reni Safira, serta teman-teman D'nyaman Home Stay Ihul, Ipul, Habib, Padi, Faiz, dan Hadi.
8. Sahabat TM Almay Widyawati dan Rifky Kholif Prasetyo, dan Keluarga Rabbani Ghani Fadhil Rabbani, Susy, Mesti, Sindy, Irda.
9. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN Desa Tri Tunggal Jaya Kelompok 11 angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari maha kuasa Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecualinya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Macam-Macam Jual Beli	31
5. Khiyar-Khiyar Jual Beli	34
B. Hukum Perlindungan Konsumen	36
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	36
2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	40
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	45
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	47
5. Perbuatan Dilarang Bagi Pelaku Usaha	49
C. Tinjauan Pustaka	51

BAB III : LAPORAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	54
B. Gambaran Umum Para Pedagang Es Krim <i>Aice</i>	58
C. Harga Yang Telah Disepakati Oleh Agen Es Krim <i>Aice</i>	63
D. Faktor Yang Menyebabkan Pedagang Meningkatkan Harga EsKrim <i>Aice</i> secara Sepihak	65
E. Pendapat Konsumen atas Kenaikan Harga Sepihak Oleh Pedagang Es Krim <i>Aice</i>	67

F. Bentuk Perlindungan dari Agen Es Krim Aice Terhadap Konsumen.....	73
---	----

BAB IV : ANALISIS DATA

A.Praktik menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim <i>aice</i>	75
B.Pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim <i>aice</i>	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Rekomendasi.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur dan Nama Kepala Desa Beserta Masa Jabatannya	54
Tabel 1.2 Data Luas Wilayah dan Penggunaan di Desa	56
Tabel 1.3 Data Jumlah Penduduk.....	57
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Desa Triharjo	58
Tabel 1.5 Daftar Harga Es Krim <i>Aice</i>	64



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran agar memudahkan proses pembuatan proposal ini. Maka perlu adanya penjabaran mengenai istilah-istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan demikian, sangat diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan beberapa istilah yang digunakan. Selain itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul ” Praktik Menaikkan Harga Sepihak Oleh Pedagang Dalam Penjualan Es Krim Aice Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Dengan uraian sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹
2. Menaikkan Harga Sepihak adalah peningkatan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang dengan cara sepihak tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.²
3. Pedagang adalah orang yang kerjanya berdagang.³
4. Penjualan yaitu proses, cara, perbuatan menjual (tempat menjual).⁴

¹ Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 949

² *Ibid*, h. 950

³ *Ibid*, h. 285.

⁴ *Ibid*, h. 589.

5. Es Krim *Aice* adalah salah satu produk es krim yang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, es krim ini memiliki banyak keunikan dan ragam rasa yang lezat.⁵
6. Pandangan adalah sudut pandang, pandangan, tinjauan pembahasan, dan analisis.⁶
7. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam⁷. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.⁸
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁹

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan mendasar dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Alasan Objektif

Permasalahan didalam penelitian ini adalah merupakan salah satu masalah praktik muamalah yang tumbuh dan beredar luas yang berkembang didalam kehidupan masyarakat.

⁵F Yasya Ghaniya, Bernik Merita (*Analisis Diferensiasi Produk Pada PT. Alpen Food Industry*), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan* Vol 13 no.1 Februari, 2017), h. 23.

⁶Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English, 1991), h. 691.

⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154

⁹ Miru Ahmad, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-9, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), h. 2

2. Alasan subjektif

Disamping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswa syari'ah prodi Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹⁰

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Jual beli adalah transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan *ijab* dan *qabul* yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.¹¹

Adapun prinsip jual beli yaitu perjanjian tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S An-Nisa (4) : 29



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹²

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: rajawali pers, 2016), h. 64.

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Raja Publishing 2011), h. 188

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT memperbolehkan jual beli untuk mencari harta yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi harus dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, dan juga harus ada kerelaan antara pihak penjual dan pembeli agar transaksi jual beli ini sah sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu prinsip di bidang ekonomi yaitu mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar mereka akan melakukan perbuatan yang merugikan konsumen.

Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dapat mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang, baik melalui berbagai kiat promosi yang memikat konsumen, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar yang cenderung lebih melindungi pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen. Kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang menjadikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah .

Dari uraian diatas, pedagang Es Krim *Aice* di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan melakukan perbuatan usaha yang dapat merugikan konsumen yaitu dengan menaikkan harga es krim *aice* tersebut secara sepihak. para pedagang es krim *aice* menaikkan harga demi mendapatkan keuntungan yang lebih, tanpa mempertimbangkan perjanjian yang telah disepakati dengan agen saat mengambil produk es krim *aice*

untuk di jual kembali. Perjanjian antara agen dengan pedagang es krim *aice* bahwa, agen es krim *aice* telah memberikan patokan harga kepada pedagang. Yang mana pedagang es krim *aice* dilarang untuk menaikkan harga es krim *aice* tersebut secara sepihak. Apabila pedagang es krim *aice* menaikkan harganya dan pihak agen mengetahui hal tersebut, maka produk es krim *aice* tersebut akan ditarik dari pihak agen sesuai dengan kesepakatan awal. Kenaikan harga tersebut dapat merugikan konsumen dan juga menurunkan mutu produk es krim *aice*.

Kasus yang terjadi dalam uraian diatas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 (hak konsumen huruf b) yang berbunyi hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan¹³. Dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 (huruf b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 10 pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

¹³Miru Ahmad, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Raja Grafindo, Cet. 9, 2015), h. 38.

¹⁴*Ibid*, h. 51.

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.¹⁵

Kasus menaikkan harga sepihak ini memang sering kali terjadi namun pelaku usaha tidak memperdulikan hal tersebut karena pelaku usaha hanya ingin mengambil keuntungan yang tinggi namun tidak memperhatikan efek yang terjadi yaitu merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena didalam label harga sudah tertera tetapi saat konsumen akan membayar ternyata harga tidak sesuai dengan labelnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang praktik menaikkan harga sepihak yang dilakukan antara pihak pedagang atau *reseller* es krim *Aice* kepada kosumen, kemudian penyusun tuangkan dalam sebuah judul “Praktik Menaikkan Harga Sepihak Oleh Pedagang Dalam Penjualan Es Krim *Aice* Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

¹⁵*Ibid*, h. 94.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Praktik Menaikkan Harga Sepihak Oleh Pedagang Dalam Penjualan Es Krim *Aice* Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tentang menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim *aice*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim *aice*?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tentang menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim *aice*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim *aice*.

G. Signifikansi Penelitian

1) Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman. Selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik menaikkan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim *aice* dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Desa Triharjo Lampung Selatan.

2) Kegunaan praktis

Penelitian ini bermaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹⁶ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan. Pengertian deskriptif menitik beratkan pada observasi alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati segala dan mencatat dan tidak memanipulasi.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum dari praktik jual beli es krim *aice*, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam studi lapangan didapatkan

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002) h.54.

dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Pedagang Es Krim *Aice* di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.¹⁷ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.Ke-27 (Bandung: Alfabeta, , 2018), h. 224

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.¹⁸

b. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian¹⁹. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap perlindungan konsumen atas kenaikan harga sepihak oleh pedagang dalam penjualan es krim *aice*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁰

5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian.²¹ Dalam penelitian ini populasi yang diteliti yakni 30

¹⁸ *Ibid*, h. 64.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-13 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 63.

²⁰ *Ibid*, h. 65.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017) h. 80.

konsumen. Yang mana 30 konsumen tersebut terbagi menjadi 6 konsumen dalam setiap penjual atau *reseller* es krim *aice*.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²² Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sample yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.

Dalam hal ini penentuan sample sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kedudukan yang dapat mewakili populasi penelitian tersebut. Yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah pihak agen es krim *aice* 1 orang, pihak penjual atau *reseller* 5 orang, dan konsumen sebanyak 15 orang.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk

²²*Ibid*, h. 81.

mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²³

b. *Sistemating*

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁴

7. Analisis data

Data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu deduktif dan induktif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode berfikir induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil

²³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet-ke 13,(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 77.

²⁴*Ibid*, h. 21.

penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli berasal dari kata باع (*baa'a*).¹ Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).² Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).³

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira' al-mubadalah* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT (Q.S Faathir [35] : 29).



إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Q.S Faathir [35]: 29).⁴

¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 293.

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

³Sulaiman Ahmad Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 750.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 700.

Menurut istilah, Ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satunya sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.⁵

Berdasarkan definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara *ijab* dan *qabul* yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Tukar menukar harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*. Ijab (ungkapan menjual dari penjual) dan *qabul* pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh di perjualbelikan,

⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*(Jakarta: rajawali pers, 2016), h. 64.

karena benda-benda itu oleh agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim. Jika jenis benda-benda itu tetap diperjualbelikan, maka jual belinya dipandang tidak sah.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

⁶Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 66.

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah [2] : 275).⁷

Ayat ini menjelaskan tentang halalnya transaksi jual beli dan haramnya transaksi *riba*. Kandungan dari ayat ini pula, sangat menentang argumen dari kaum *musyrikin* yang menghalalkan adanya transaksi *riba*. Dalam ayat ini kaum musyrikin tidak mengakui adanya jual beli yang telah di perintahkan oleh Allah SWT dalam surah-Nya, dan menganggapnya sama dengan sistem *ribawi* yang dianutnya. Oleh sebab itu, dengan adanya ayat ini, Allah SWT mempertegas hukum tentang jual beli dan menolak serta melarang transaksi *riba*.

2) Dalam firman-Nya Q.S An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 69.

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ أَكْسَبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلُّ بَيْدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزارو صححه احاكم)

Artinya : Diriwayatkan Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik”.

(HR. Al-Bazzar dan dianggap sahih menurut Al-Hakim).⁹

Berdasarkan hadits diatas kaum muslimin telah ijma’ tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada ditangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atauimbalanya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan idup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹⁰

⁸Ibid, h. 122.

⁹Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Thoba’ah Wal-Nashar Al-Tauzi’, t. th),h. 165.

¹⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*(Jakarta: rajawali pers, 2016), h. 65.

Dan juga maksud dari hadits tersebut adalah usaha yang paling baik adalah melakukan transaksi jual beli yang baik atau dengan cara yang halal tanpa adanya transaksi yang curang atau merugikan salah satu pihak. Sedangkan maksud mabrur dari hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.¹¹

2) Hadits Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah

عَنْ ابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :“jual beli itu harus sama-sama suka”.
(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).¹²

c. *Ijma'*

Dalil dibolehkannya jual beli menurut *ijma'* para ulama adalah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹³

Berdasarkan ayat, hadits, dan *ijma'* yang telah dijelaskan diatas jual beli itu hukumnya adalah mubah (boleh). Hukum jual beli bisa menjadi

¹¹Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

¹²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, (Juz II, Darul Fikri, Beirut, t, th), h. 1737.

¹³Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75

haram, mubah, sunnah, dan wajib tetapi harus dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli bisa menjadi haram, jika melakukan transaksi jual beli yang diharamkan oleh *syara'*, seperti menjual babi, darah, dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah SWT.
- 3) Hukum jual beli bisa menjadi sunnah, jika seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah hukumnya.
- 4) Jual beli yang hukumnya makruh, apabila transaksi jual beli dilakukan pada saat selesai.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam.¹⁵ Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*Arkan*", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu

¹⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 315.

¹⁵M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 75.

termasuk didalam pekerjaan itu.¹⁶ Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:

- 1) *Al- 'Aqidani*, yaitu dua pihak yang berakad yaitu antara penjual dan pembeli.
- 2) *Mauqud 'alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
- 3) *Sighat*, yaitu ijab dan *qabul*.¹⁷

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut jumhur Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Ba'i* (penjual).
- 2) *Mustari* (pembeli).
- 3) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*).
- 4) *Mauqud 'alaih* (benda atau barang).¹⁸

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga

¹⁶M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 301.

¹⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mahzab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 16.

¹⁸Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan sebagainya.

Berikut adalah syarat jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang dilakukan sah, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak sahnya suatu transaksi jual beli. apabila seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum, maka penjualan yang dilakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya jika seseorang dipaksa membeli.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang-orang yang berakal, maka akad yang dilakukan oleh orang gila atau idiot, maka tidak sah kecuali dengan ijin walinya.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak maksudnya penjual memiliki harta berupa barang yang ingin dijual dan pembeli memiliki harta berupa uang.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, maka tidak diperbolehkan menjual barang haram misalnya minuman keras dan video yang tidak senonoh.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.
6. Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Objek transaksi dapat diketahui dengan dua cara, yaitu:

- a) Barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang di perkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu.
- b) Spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.

7. Harga harus jelas pada saat transaksi dilakukan.¹⁹

Adapun syarat jual beli, para Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, berikut beberapa madzhab tentang persyaratan jual beli tersebut:

1) Madzhab Hanafiyah

a) Syarat Terjadinya Akad (*in'iqad*)

Syarat ini adalah syarat yang sudah ditetapkan oleh syara'. Jika pernyataan ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut batal.

Tentang syarat ini, Ulama Hanfiyah menetapkan empat syarat, sebagai berikut:

(1) Syarat *Aqid* (orang yang akad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) Berakal dan *Mumayyiz*

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus *baligh*.

Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak *mummayiz* dan

berakal secara umum terbagi tiga:

- a. *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.

¹⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam fiqh Muamalat* (Cet-ke-H; Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h . 84

b. *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil

c. *Tasharruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemudharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

(a) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

(2) Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Namun demikian, dalam *ijab* dan *qabul* terdapat tiga syarat berikut ini:

a) Ahli Akad

Menurut Ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akal nya pada ayat diatas adalah anak yatim yang masih kecil (belum *baligh*) atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.

c) *Ijab* dan *qabul* harus bersatu, yakni berhubungan antara *ijab* dan *qabul* walaupun tempatnya tidak bersatu.

(3) Tempat Akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*.

(4) *Ma'uqud 'alaih* (Objek Akad)

Ma'uqud alaih harus memenuhi empat syarat :

a. *Ma'uqud alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah belum nampak, atau jual beli anak hewan yang asih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.

b. Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

c. Benda tersebut milik sendiri.

d. Dapat diserahkan.

b) Syarat pelaksanaan akad (*Nafadz*)

1) Benda dimiliki *aqid* sesuatu berkuasa untuk akad.

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri,

kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauquf*).

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan) jual beli terbagi menjadi dua:

(a) Jual beli *nafadz*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

(b) Jual beli *mauquf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli *fudhul* dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.

c) Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

1) Syarat Umum

Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan,

pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudaran, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(a)Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

(b)Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.

(c)Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.

(d)Terpenuhi syarat penerimaan.

(e)Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.

(f)Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

d) Syarat *Lujum* (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, maksud dari kemestian adalah syarat tersebut harus benar-benar terlaksana oleh kedua belah pihak, karena akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar*

(pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2) Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *sighat*, *ma'qud 'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat:

a) Syarat *Aqid*

Aqid adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- (1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- (2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- (3) Keduanya dalam keadaan suka rela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- (4) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyariatkan harus Islam bagi *aqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.

b) Syarat dalam *Sighat*

- (1) Tempat akad harus bersatu.
- (2) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah. Di antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.

c) Syarat Harga dan yang Dihargakan

- (1) Bukan barang yang dilarang syara'.
- (2) Harus suci, tidak dibolehkan menjual *khamr*, dan lain-lain.
- (3) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- (4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
- (5) Dapat diserahkan.²⁰

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual beli berdasarkan pertukarnya secara umum terbagi menjadi empat:

- 1) Jual beli *salam* (pesanan) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang tersebut diantar belakangan.
- 2) Jual beli *muqayadah* (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar suatu barang dengan barang yang lainnya.
- 3) Jual beli *muthlaq* yaitu jual beli suatu barang dengan sesuatu yang telah disetujui dari awal sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli suatu barang yang biasa digunakan antara alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.²¹

b. Berdasarkan segi harga, jual beli juga dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Jual beli (*Al-Murabahah*) yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak).

²⁰Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76-81.

²¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (Juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 46.

- 2) Jual beli (*At-Tauliyah*) yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, sebab menjual barang sesuai dengan harga aslinya (modal), tanpa adanya penambahan atau pengurangan harga.
- 3) Jual beli (*Wadi'ah*) yaitu jual beli dengan harga aslinya dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- 4) Jual beli (*Al-Isthisna'*) yaitu kontrak jual beli dimana harga barang tersebut dibayar di awal namun dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan awal.
- 5) Jual beli (*Al-Musawah*) yaitu penjual tidak menjual dengan harga aslinya namun, kedua akad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang terus berkembang pesat saat ini.²²

c. Berdasarkan dari segi benda yang dijadikan objek jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya adalah pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maksudnya ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tunai (kontan), *salam* pada awalnya

²²Ghufran A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 142.

berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada ialah, jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²³

d. Berdasarkan dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui perantara (utusan, tulisan, atau surat-menyurat) sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 75-77.

3) Jual beli dengan perbuatan (*mu'athah*) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa adanya *ijab* dan *qabul*.²⁴

5. Macam-Macam Khiyar dalam Jual Beli

Dari segi bahasa *Al-Khiyar* berarti pilihan. *Khiyar* secara terminologis adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak atau karena faktor-faktor atau sebab-sebab tertentu.²⁵

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Khiyar Majlis*, yaitu tempat transaksi dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.
- b. *Khiyar Syarat*, merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: "Saya beli barang ini dari Anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari". Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi.

²⁴*Ibid*, h . 77-78.

²⁵Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 82.

c. *Khiyar 'aib*, adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang tersebut.²⁶

Selain dari tiga kategori *khiyar* tersebut di atas, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, membagi *khiyar* kepada empat macam, tambahannya adalah *khiyar al-ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak dari penipuan). *Khiyar al-ghabn* dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) *Tasriyah*, bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu kambing itu berkumpul di kantong susunya sehingga membuat kesan para pembeli bahwa susu unta atau kambing itu sudah banyak. Menurut mayoritas Ulama bahwa tindakan *tasriyah* membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pada pilihan pembeli yang dirugikan karena penipuan ini. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak menyetujui pembatalan kontrak tersebut, mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak memberatkan dari penjual.
- 2) *Tanajush* yaitu menawarkan harga yang tinggi suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.
- 3) *Ghabn fahisy* yaitu kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2013), h. 105-106.

atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian besar yang dialami oleh suatu pihak, bukan penyebab untuk membatalkan kontrak, tetapi adanya sebab penipuan atau penggambaran yang salah.

- 4) *Talaqqi ar-rukban*, yaitu transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang dagangan dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke pasar. Orang-orang kota pergi ke luar kota untuk menyongsong orang Badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan orang Badui untuk terlebih dahulu mensurvei harga, agar dia tahu harga pasar. Ini cara lain bentuk penipuan sebagai penggambaran yang salah, yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan.²⁷

B. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelum lebih jauh membahas mengenai hukum perlindungan konsumen, maka akan lebih baik apabila memahami dengan baik mengenai apa itu perlindungan konsumen, sebab tidak semua orang mengetahui dengan baik tentang perlindungan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang

²⁷Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 86-87.

seimbang menyebabkan konsumen berada di titik yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalah gunakan posisinya yang monopolistik tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.²⁸

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan

²⁸ Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ed.1-Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1.

konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen yang menjadi lemah. Disamping itu, untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen produsen juga dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen tersebut.

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melengkapi ketentuan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan tidak cukup hanya mencontoh undang-undang negara lain yang dianggap berhasil dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, karena keberhasilan undang-undang di negara lain belum tentu mencapai keberhasilan yang sama di Indonesia.

Menurut Friedman, agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu *pertama*, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya; *kedua*, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan melaksanakan aturan itu; *ketiga*, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu. Berdasarkan pandangan tersebut dapat di kemukakan bahwa pembentukan ketentuan hukum atau pembaharuan hukum bukan sekadar pembaruan substansi hukumnya, melainkan pembaruan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pembaruan hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai akibat perubahan nilai-nilai hidup

bermasyarakat. Nilai-nilai hukum yang baru inilah yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang baru.²⁹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK) tersebut cukup memadai kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang

²⁹*Ibid*, h. 4-5

Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum administrasi Negara).³⁰

2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

a. Asas hukum perlindungan konsumen

Asas hukum menurut Paul Scholten, adalah kecenderungan yang memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitupula menurut H.J. Hommes asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit, melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Mirip dengan pendapat itu menurut Satjibto Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.³¹

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat lima asas yaitu sebagai berikut:³²

1) Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mendapatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-

³⁰Miru Ahmad, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-9, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), h. 2

³¹Wahyu Sasangko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung : Universitas Lampung, 2007), h. 36.

³²Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

masing pihak yaitu produsen maupun konsumen. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan bermanfaat pada kehidupan berbangsa.³³

2) Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).³⁴

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Asas ini bermaksud agar konsumen, pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen maupun pemerintah haruslah diatur dan diwujudkan secara seimbang dalam kehidupan berbangsa dan

³³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2010), h. 31

³⁴ *Ibid*, h. 32

bernegara. Tidak ada yang dilebihkan atau dikurangi kadar keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan juga pemerintah.

4) Asas keamanan dan keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini meminta adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaiknya produk itu akan mengancam keselamatan atau kesehatan pemakainya. Karena itu, undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan menjualkan produknya.³⁵

5) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum bermaksud agar antara pelaku usaha ataupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini berharap bahwa aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang ini harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari sehingga semua pihak mendapatkan keadilan. Oleh sebab itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang sesuai dengan bunyinya setiap

³⁵*Ibid*, h. 32

peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas tersebut, sebab dijunjung tinggi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.³⁶

b. Tujuan hukum perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen merupakan tujuan atau keadaan yang harus dicapai atau diwujudkan demi keadilan sosial dalam bernegara. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen haruslah di susun dan dibangun dengan rencana yang sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tujuan perlindungan konsumen meliputi aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam pasal 3 UUPK telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

³⁶*Ibid*, h. 33.

- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁷

Pasal 3 UUPK ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus. Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 UUPK, yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 diatas.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian

³⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

hukum terlihat dalam rumusan huruf d. pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan pada huruf a sampai huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.

Kesulitan memenuhi ketiga tujuan hukum (umum) sekaligus sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menjadikan sejumlah tujuan khusus dalam huruf a sampai huruf f dari Pasal 3 tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat. Termasuk dalam hal ini, substansi ketentuan pasal demi pasal yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya. Unsur masyarakat sebagaimana dikemukakan berhubungan dengan persoalan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, yang seterusnya menentukan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.³⁸

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4, “ Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

³⁸Miru Ahmad, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-9, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), h. 34-35.

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.³⁹

Kewajiban Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5, bahwa ada 4 kewajiban yang harus dilakukan konsumen yaitu:

- a. “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

³⁹*Ibid*, h. 38.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan.⁴⁰

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, pengertian pelaku usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 3 UUPK. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha atau yang dapat disebut sebagai pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya. Pelaku usaha di dalam UUPK memiliki kewajiban untuk beritikad baik di dalam

⁴⁰*Ibid*, h. 47- 48.

melakukan atau menjalankan kegiatan usahanya, hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam UUPK.⁴¹

Hak pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6, “Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.⁴²

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7, “Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

⁴¹Dewi Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 57.

⁴²Miru Ahmad, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-9, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), h. 50.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian”.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴³

5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban saja, akan tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa

⁴³*Ibid*, h. 51-52.

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/ atau jasa.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam BAB IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada pasal 8 ayat (1) di dalam undang-undang ini menyatakan bahwa “ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau *etiket* barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau *kemajuran* sebagaimana dinyatakan dalam label, *etiket* atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,*etiket*, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;

⁴⁴Dewi Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 62.

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

C. Tinjauan Pustaka

Suatu penelitian memerlukan adanya dukungan dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Pertama, Novia Yulianti Azali dengan judul: Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Supermarket Pamella Dua dan Super Indo Yogyakarta). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Novia Yulianti Azali ialah tentang selisih

⁴⁵*Ibid*, h. 63-64.

harga pada label *display* (rak barang) dengan harga yang dikenakan pada saat pembayaran di kasir. Objek dari penelitian ini dilakukan pada dua supermarket berbeda di kota Yogyakarta yakni tepatnya pada Supermarket Pamella Dua dan Super Indo Yogyakarta. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan oleh Novia Yulianti Azali dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilaksanakan.⁴⁶

Kedua, Mohamad Alim Mutaqin dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak oleh Pembeli (Studi kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syari'ah. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Alim Mutaqin yaitu tentang perubahan harga secara sepihak oleh seorang pembeli. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Alim Mutaqin dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan.⁴⁷

Ketiga, Yeni Hendriyani dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikkan Harga makanan di Objek wisata (Studi di Pantai Pangandaran). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah,

⁴⁶Novia Yulianti Azali, "Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Supermarket Pamella Dua dan Super Indo Yogyakarta)", (On-line), tersedia di: digilib.uin-suka.ac.id/21642/ (9 Maret 2020).

⁴⁷Mohamad Alim Mutaqin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak oleh Pembeli (Studi kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)", (On-line), tersedia di: eprints.walisongo.ac.id/4863/1/112311039.pdf (9 Maret 2020).

Fakultas Syari'ah dan Hukum. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Yeni Hendriyani yaitu tentang kenaikan harga makanan yang terdapat di objek wisata di pantai Pangandaran. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Hendriyani dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan.⁴⁸

Namun yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni membahas mengenai kenaikan harga sepihak yang dilakukan oleh penjual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novia Yulianti Azali terfokus pada selisih harga yang terjadi pada suatu produk dalam *display* (rak barang) dengan pembayaran pada saat di kasir, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Alim Mutaqin terfokus pada perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli, yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yeni Hendriyani yaitu terfokus pada kenaikan harga makanan yang terjadi di tempat-tempat wisata.

⁴⁸Yeni Hendriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikkan Harga makanan di Objek wisata (Studi di Pantai Pangandaran)", (On-line), tersedia di: digilib.uin-suka.ac.id/13470/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf (9 Maret 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Munib, Abdul (Hukum Islam dan Muamalah “Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah”, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman Vol. 5 No. 1 Februari 2018.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mahzab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, (Juz II, Darul Fikri, Beirut, t, th).
- Al-Asqalani Al-Hafidz, Ibnu Hajjar, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba’ah Wal-Nashar Al-Tauzi’, t. th.
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- RI Departemen agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: Raja Publishing 2011
- Pendidikan Nasional Departmen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- RI Departemen, Al-Qur’an dan Terjemahan, Semarang: CV Asy-Syifa, 1989
- Dewi, Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- F Yasya, Ghaniya, Bernik Merita, (*Analisis Diferensiasi Produk Pada PT. Alpen Food Industry*”, jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan Vol 13 no.1, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ghufran, A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mujieb, M. Abdul, Mabruki Thalib dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Ahmadi, Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed.1-Cet. Ke-2, 2013.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pranamedia Group, 2013.

Alim, Mutaqin Mohamad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak oleh Pembeli (Studi kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan).

Yulianti, Azali Novia, "Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Supermarket Pamella Dua dan Super Indo Yogyakarta).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

Ahmad, Miru, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo, Cet. Ke-9, 2015.

Jawad, Mughniyah Muhammad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (Juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*, Jakarta: Lentera, Cet. Ke-1 2009.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: rajawali pers, 2016.

Sudarwan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta :Andi, 2004.

Yahya, Al- Faifi Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. Cet-H, 2007

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sasangko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung : Universitas Lampung, 2007.

Wawancara dengan Bapak Mei Kasianto selaku *reseller* es krim *aice* di Dusun Girijaya Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 14 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Safarudin selaku *reseller* es krim *aice* di Dusun Hargomulyo Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 14 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Suparno selaku *reseller* es krim *aice* di Dusun Panglong Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 16 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Sutijo selaku *reseller* es krim *aice* di Dusun Batu Ampar Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 16 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Antonius Dwi Prasetyo selaku *reseller* es krim *aice* di Dusun Tempel Rejo Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 16 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Andri selaku agen es krim *aice* di Desa Kaliayu, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 16 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Andri selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 17 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Habib Mustofa selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 17 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Eka Setiawan selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 17 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Danang Wiku Prasetya selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 21 juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Cakap Wicaksono selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 21 juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Satria Wiguna selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 21 juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Muhadi selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 21 juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Aris Setiawan selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 21 juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Stefanus Budi Prasetyo selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 21 juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Dicky Janu selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 21 juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Pramana Utama selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 21 juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Angga Girijati selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 21 juli 2020.

Wawancara dengan Ibu Citra Wandira selaku konsumen es krim *aice* di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, 21 juli 2020.

Yeni, Hendriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikkan Harga makanan di Objek wisata (Studi di Pantai Pangandaran).

<https://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>